

**PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum**



**Oleh**

**ASMAN WAHIDI  
NIM. 10621003667**

**PROGRAM S-1  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, agar lebih jelas isi dari PP No.45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis, dan dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarnya. Maksud dari isi PP No.45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik itu pegawai negeri sipil yang pria maupun yang wanita.

Namun, berdasarkan hasil penelitian awal dalam wawancara penulis dengan pegawai yang bertugas di Pengadilan Agama Pekanbaru, ada 3 perkara dari tahun 2008-2010 perceraian PNS yang diputuskan tanpa ada surat izin dari atasannya. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian guna untuk mengetahui bagaimana prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru, Apa saja hambatan dalam prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Bagaimana tinjauan PP No. 45 Tahun 1990 terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Metode penelitian yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini adalah *field reseach* dengan cara survey ke lapangan dengan menggunakan wawancara kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim, Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti tentang prosedur perceraian PNS di Pengadilan Agama Pekanbaru sama dengan perceraian yang tidak PNS, yang menjadi perbedaan adalah PNS harus melampirkan surat izin dari atasannya, dan jika PNS tidak dapat melampirkan surat izin dari atasannya selama 6 bulan, namun PNS tetap menginginkan melanjutkan tuntutan, maka PNS harus membuat surat pernyataan bahwa ia akan menanggung semua resiko yang akan terjadi setelah putus perkara tersebut, tanpa ada melibatkan pihak pengadilan. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 PNS yang akan melakukan perceraian harus meminta izin dari atasan tempatnya bertugas, jadi dapat dikatakan bahwa prosedur perceraian PNS di Pengadilan Agama Pekanbaru menyalahi Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi PNS, jika PNS tetap melakukan perceraian walau tidak mendapatkan surat izin, maka PNS mendapatkan sanksi berupa diturunkan golongannya, atau pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
PENGHARGAAN	
PERSETUJUAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II. PROFIL PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama.....	10
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	12

### BAB III. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Perceraian .....	18
B. Perceraian Menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 .....	20
C. Syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	27
D. Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru .....	35

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru .....	40
B. Faktor Penghambat Dalam prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru. ....	44
C. Tinjauan PP No. 45 Tahun 1990 terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru .....	48

### BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

### DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latarbelakang Masalah

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut *thalaq* atau *furqah*. Adapun arti dari pada *thalaq* adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai lawan dari berkumpul.<sup>1</sup> Kemudian kedua perkataan itu dijadikan oleh ahli *fiqih* sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.

*Thalaq* menurut ahli umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang dijatuhkan dengan sendirinya, atau perceraian karena meninggalkan salah seorang dari suami istri. Dan menurut arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>2</sup> Oleh karena sering terjadi menderita bagi kaum wanita yang diceraikan suaminya dan banyak terjadi poligami yang menderita bagi istrinya. Maka pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan UU No. 1/74, tentang perkawinan, PP No. 9/75 tentang penjelasan UU No. 1/74, peraturan Menteri Agama No. 3/75 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 1/74.

Dalam UU No. 1/74 diatur tata cara perkawinan, poligami, *thalaq*, cerai dan *ruju'* yang bertalian dengan perkawinan. Masalah perceraian itulah salah satu sebab yang

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), cet ke-II, h. 156

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 1986), cet ke-II, h. 104

mendorong untuk diciptakannya Undang-undang perkawinan diantara sebab yang lain.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.<sup>4</sup> Dengan maksud mempersulit terjadinya perceraian itu maka ditentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun lagi. Seiring dengan itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan satu alasan, dan alasan pasal 39 UUP diterangkan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Adapun proses yang harus dilakukan oleh pemohon untuk melakukan perceraian ialah:

1. Pemohon (Suami) yang akan menceraikan istrinya harus minta surat keterangan dari kepala desanya (model Tra).<sup>6</sup>
2. Pemohon (Suami) yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat permohonan pada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, disertai dengan alasan yang kuat, serta meminta ke pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

---

<sup>3</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1980), h. 36

<sup>4</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet ke-1, h. 22

<sup>5</sup> Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet ke – III, h.. 59

<sup>6</sup> Moch Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1984), cet ke-II, h. 67

3. Setelah pengadilan menerima surat permohonan tersebut kemudian setelah mempelajarinya selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima permohonan, pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai untuk diminta penjelasannya.
4. Setelah pengadilan mendapatkan penjelasan dari suami istri, ternyata memang ada alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat bahwa suami istri yang bersangkutan tidak mungkin hidup rukun lagi (damai), maka pengadilan member izin terhadap pemohon (suami) untuk menceraikan istrinya.
5. Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirim kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan.
6. Pencatatan itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>7</sup>

Apabila telah terjadi perceraian, maka pengadilan membuat surat keterangan tentang adanya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dibuat lima rangkap, yaitu helai pertama disimpan di pengadilan, helai kedua dan ketiga dikirim masing-masing kepada Pencatat Perceraian Nikah (PPN) setempat dan PPN dulu tempat pernikahan untuk diadakan pencatatan perceraian, sedang helai keempat dan kelima diberikan kepada suami istri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soemiyati, *op.cit.*, h. 131

<sup>8</sup> Arso Sosrostmodjo, *op.cit.*, h. 61

Persyaratan tersebut dimaksud untuk mengatur agar pelaksanaan perceraian tidak terjadi sewenang-wenang dan sekaligus untuk menghambat terjadinya perceraian. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikan istrinya mengindahkan ketentuan umum sebagaimana termuat dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya tercantum dalam PP No.9/75, juga harus mengindahkan ketentuan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang termuat dalam PP No.45/90 yang mengatur tentang izin perceraian.<sup>9</sup>

Izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No.45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3, agar lebih jelas, adapun isi dari PP No.45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarnya.

---

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta:Media Sarana Press,1986), h. 65

Maksud dari isi PP No.45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik itu pegawai negeri sipil yang pria maupun yang wanita.

Apabila persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi dan telah mendapatkan izin dari pejabat, kemudian ia melakukan perceraian menurut undang-undang yang berlaku, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.<sup>10</sup>

Begitu juga dalam teknis administrasi peradilan agama diatur bahwa pada pendaftaran perkara tingkat pertama ada beberapa dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I, diantaranya menyerahkan surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, menyerahkan surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain), dan khusus bagi pegawai negeri sipil harus menyerahkan surat izin dari atasan (surat edaran tuada uldiltun MARI no. ma/kumdil/8810/1987).<sup>11</sup>

Kalau dilihat dari persyaratan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai sangat dipersulit, karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, dan menjadi teladan sebagai wadah Negara yang baik dalam masyarakat dan kehidupan keluarganya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 385

<sup>11</sup> Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, 2009, h. 1



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa adanya surat dari atasan, namun dapat diputuskan oleh hakim dengan berkekuatan hukum tetap. Pada tahun 2008-2010 ada tiga perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada surat izin dari atasannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya, kepada prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2008-2010.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru?

---

<sup>12</sup> Wan Wahid, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2010

3. Bagaimana tinjauan PP No. 45 Tahun 1990 terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui tinjauan PP No. 45 Tahun 1990 terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ahwal al-syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
2. Sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang terletak di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1. Adapun alasan penulis meneliti pada Pengadilan Agama Pekanbaru ini karena masalah tersebut belum pernah diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para Hakim, Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan pihak yang berperkara, sedangkan objek penelitian ini adalah prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diambil dari kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2008-2010 di Pengadilan Agama Pekanbaru
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari literatur-literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin dari atasannya pada tahun 2008-2010 adalah sebanyak 3 kasus, karena sedikitnya populasi, maka peneliti menjadikan populasi menjadi sample dalam penelitian yaitu 3 perkara (sample populasi).

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi, adalah data-data yang terkait tentang prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian.

## 6. Analisa Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah-kaedah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara mendetail data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisis.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA**

Dalam bab ini akan diuraikan Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, Tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama Pekanbaru.

### **BAB III : TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Dalam bab ini membahas tentang Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974, Pengertian Perceraian, Syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil, Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.

**BAB IV : PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN  
1990 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU).**

Dalam bab ini menjelaskan tentang prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru, Faktor Penghambat dalam prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Tinjauan PP No. 45 Tahun 1990 terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

## **BAB II**

### **PROFIL PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama**

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendikiawan yang berada di Riau khususnya di Pekanbaru, maka diusulkanlah sebagai pimpinan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Pekanbaru. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Dengan dilantiknya KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, maka secara yuridis Pengadilan Agama Pekanbaru telah berdiri, dan atas dasar hari pelantikan tersebut, maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru telah berumur 53 tahun.

Awal beroperasinya, Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat berkantor di Jalan Rambutan tersebut meubeller yang ada hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan

sekitar tahun 1960 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di Kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (Ketua Pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.<sup>1</sup>

Sepeninggal almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah di Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.<sup>2</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988 — 1994), Drs Abdulrahman Har, SH (1994 — 1998), Drs. H.. Lumban Hutabarat, SH, MH (2004 — 2006), Drs. H. Masrum, MH (2007 — 2008) terajhir Drs. H. Taufiq Hamami mulai tanggal 20 Oktober - sekarang.

---

<sup>1</sup> Effendi Siregar, dkk (tim penyusun), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pekanbaru 2007, h.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 6

Saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah - pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Pekanbaru Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam Protokol Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>3</sup>

Sejak tanggal 1 Juli 2004 semua badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama-sama dengan peradilan lainnya, memang secara yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara factual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga peradilan Indonesia.

---

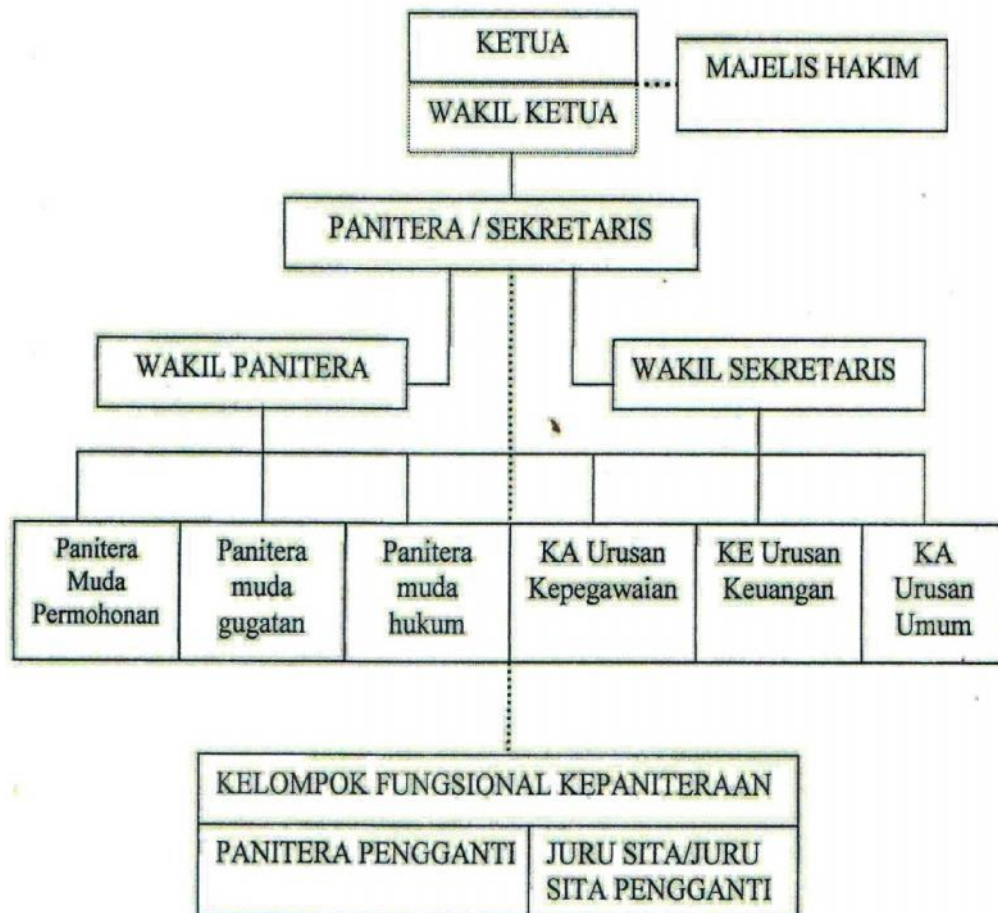
<sup>3</sup> *Ibid*,



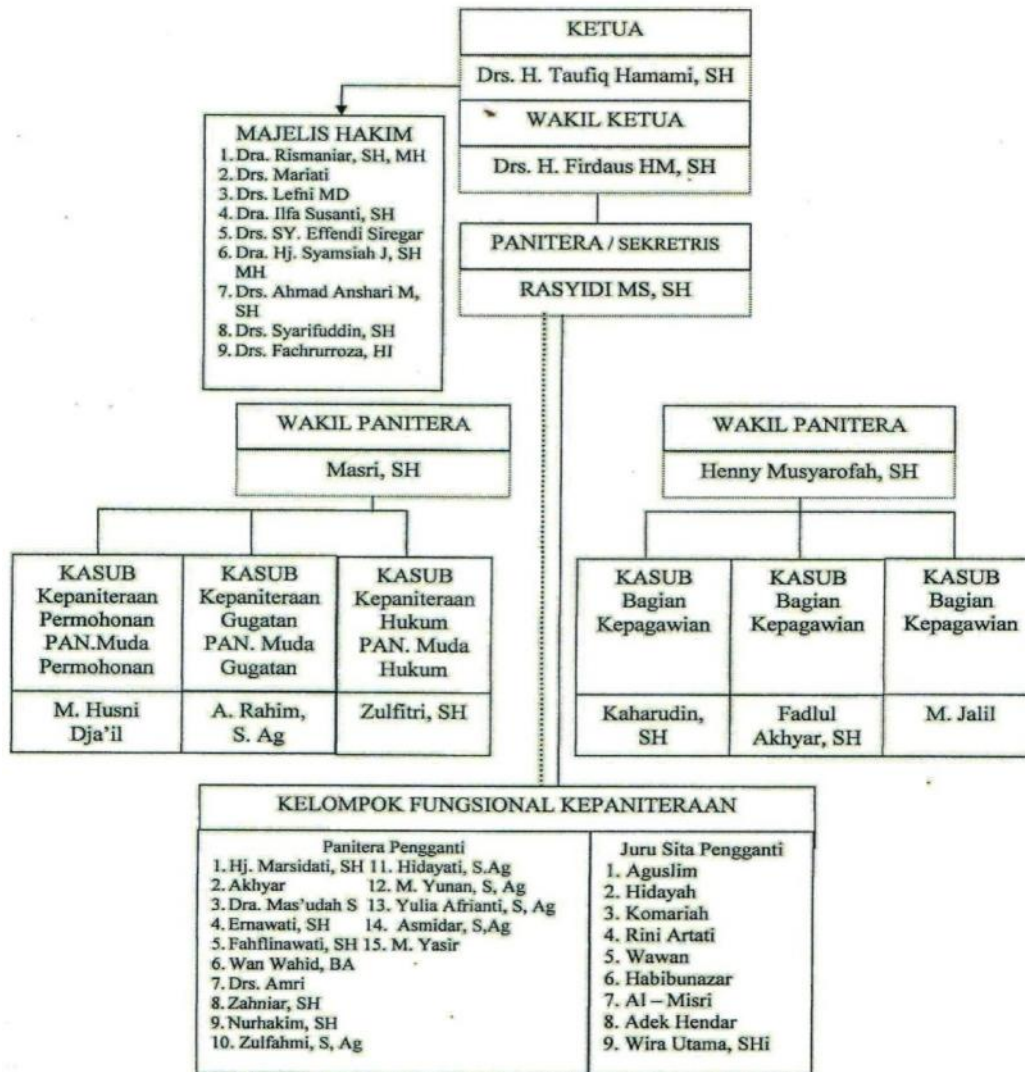
## B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang mempunyai struktur organisasi tertentu. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari ketua dan wakil ketua, majelis hakim, panitera / sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri dari panitera pengganti dan jurusita. Mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1 – A Pekanbaru**



Mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru periode ini, yaitu:



Adapun tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru di atas, Sebagai Berikut :

1. Ketua bertugas memimpin instansi dan seluruh pegawai, mengambil kebijakan, mengarahkan untuk tercapainya tujuan pengadilan baik di bidang fungsional maupun dalam bidang structural. Di samping sebagai

ketua majelis hakim dibantu oleh wakil ketua bertanggung jawab kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung atas terselenggaranya peradilan.

2. Wakil ketua bertugas mendampingi ketua dan menggantikan ketua apabila ketua berhalangan atau tidak berada di tempat. Wakil ketua membawahi hakim pengawas bidang yang bertanggung jawab kepada ketua di samping ketua majelis hakim.
3. Hakim pengawas bidang, yaitu hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk megawasi tugas dan fungsi pengelola apakah sudah sesuai dengan petunjuk aturan pola bindalmin dan administrasi kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada wakil ketua.
4. Hakim bertugas melaksanakan persidangan, menerima, menolak, menggugurkan, memutuskan dalam sebuah keputusan atau penetapan dibantu oleh panitera sidang dan jurusita pengganti.
5. Panitera / sekretaris membawahi bidang kepaniteraan, structural dalam menjalankan fungsinya agar urusan perkara dapat berjalan menurut pola bindalmin. Sebagai kuasa pengguna anggaran dalam bidang kesekretariatan, panitera / sekretaris dibantu oleh wakil panitera dan wakil dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab pada ketua di samping sebagai panitera sidang.

6. Wakil panitera membawahi 3 (tiga) panitera muda (di bidang hukum, gugatan, permohonan) untuk mengkoordinir semua perkara yang masuk dan yang putus dan juga mengkoordinir semua laporan perkara serta penjahitan arsip perkara dan sebagai panitera sidang.
7. Wakil sekretaris bertugas menyelesaikan urusan kesekretariatan membawahi 3 (tiga) kepala urusan (kaur. Umum, kaur. Kepegawaian dan ortala dan kaur. Perencanaan dan keuangan). Wakil sekretaris juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan kantor.
8. Panitera muda hukum, sesuai dengan pola bindalmin meja 3, bertugas membuat laporan bulanan, tahunan (SIADPA), menjilid berkas perkara yang telah diminutasi, menyerahkan akta cerai, mengarsipkan berkas serta sebagai panitera sidang.
9. Panitera muda gugatan, sesuai dengan pola bindalmin meja 1 bertugas menerima perkara, menaksir dan memberi nomor, mencatat dalam buku register dan menaikkan perkara ke panitera. Setelah selesai disidangkan (diputus) oleh hakim, dicatat kembali dalam buku register, serta sebagai panitera sidang.
10. Panitera muda permohonan bertugas menerima perkara — perkara permohonan, mencatat dalam register, menaikkan berkas ke panitera dan mencatat kembali setelah diputus atau ditetapkan oleh majelis hakim, serta sebagai panitera sidang.
11. Panitera pengganti bertugas menerima berkas perkara dari panitera, membantu meneliti dan melengkapi administrasi perkara, mempersiapkan pelaksanaan persidangan, mendampingi hakim dalam persidangan, membuat berita acara

persidangan, menyerahkan berkas perkara yang diputus dan diminutasi kepada panitera muda hukum, membantu menyiapkan data perkara untuk laporan dan kemudian bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitera.

12. Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah ketua majelis sidang, menyampaikan surat kepada pihak-pihak berperkara, melakukan penyitaan / eksekusi dan mempertanggung jawabkannya kepada ketua Pengadilan Agama, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, membuat berita acara penyiaran dan berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
13. Jurusita pengganti bertugas melaksanakan perintah ketua majelis sidang, membuat dan menyampaikan surat panggilan dan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak perkara.
14. Kepala urusan umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas urusan umum, membagi tugas staf urusan umum serta memantau pelaksanaan tugas bawahan, menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang surat menyurat, perlengkapan alat tulis kantor, perpustakaan, membuat laporan IKMN, membuat Inventaris, DIR, pembukuannya serta pengurusan penghapusannya dan memelihara kantor.
15. Kepala urusan kepegawaian dan ortala bertugas melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kepegawaian, mengumpulkan dan mengirim data kepegawaian,

membuat surat usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, DP3, KP4, dan SIMPEG.

16. Kepala urusan perencanaan dan keuangan, pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan surat-surat keuangan, pembuatan DIPA, laporan-laporan keuangan (SAI) dan RKAKAL, dan menandatangani SP.
17. Bendahara penerima bertugas sebagai bendahara pengelolaan uang panjar biaya perkara, mendistribusikan dan mencatat dalam buku kas Bantu, buku registerasi dan buku jurnal, serta menyetorkan uang HHK . PNBP.
18. Bendahara pengeluaran (bendahara ruitn) bertugas mengambil dana, gaji, dan keperluan kantor serta membukukannya dalam buku kas.

### **BAB III**

## **TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI**

### **SIPIL**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut A. Siti Soetami, SH adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>1</sup> Perceraian dalam istilah Ahli Fiqih disebut “Talak” atau “Furqah”.<sup>2</sup> Adapun arti dari talak menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai.<sup>3</sup>

Pasal 38 *Undang-undang* No. 1 tahun 1974 menyebut adanya tiga sebab putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Penjelasan mengenai perceraian dapat ditemui dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. UUP menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban, apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau dalam UU disebutkan bahwa salah satu

---

<sup>1</sup> A. Siti Hutami, SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara, 1991, h. 12.

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), cet ke-II, h. 156

<sup>3</sup> Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 192, h. 234.

pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, terus kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad.

Cerai dipergunakan dalam syariah untuk menunjukkan cara yang sah mengakhiri suatu perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian kalau terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hal itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Nabi Muhammad telah bersabda mengatakan bahwa perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thalak. Sebagai mana nabi Muhammad SAW bersabda :

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: ( )

Artinya: Dari ibnu umar semoga allah meredhoinya ia berkata, Rosulullah SAW bersabda perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thalak.  
(H.R Abu Daud dan Ibnu Hibban.)

Kata-kata ini harus selalu dijaga dengan hati-hati, agar tidak diucapkan dengan tergesa-gesa penuh emosi dan tidak menggunakan izin perceraian ini secara sewenang-wenang. Dalam hal ini Islam bermaksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melalui perkawinan, namun jika karena beberapa alasan tujuan ini gagal, maka tidak perlu lagi mempertahankan perkawinan tersebut. Islam lebih menganjurkan perdamaian diantara kedua suami isteri daripada memutuskan hubungan perkawinan mereka. Namun jika hubungan baik diantara mereka tidak mungkin terus



dilangsungkan, maka Islampun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan menyiksa dan menyakitkan. Maka izinkanlah perceraian.

Menurut H.A. Fuad Said, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain.<sup>4</sup> Lebih lanjut Sayid Sabi' dalam kitabnya "Fiqhussunnah " mengatakan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Perceraian merupakan bahagian dari perkawinan, sebab itu tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu . Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam suatu negara .Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan didalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan rahmah . Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban.

## **B. Perceraian Menurut PP Nomor 45 Tahun 1990**

Perceraian menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 di atur sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

---

<sup>4</sup> Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, cet- pertama penerbit Pustaka Al Husnah, Jakarta, 1994, h. 1-2

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaannya di Negara Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 660-661

2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

Contoh :

- a. Saudara Amir seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai istri bernama Tuti. Saudara Amir bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Saudara Amir yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
  - b. Saudara Isti seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai suami bernama Anto. Saudari Isti bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudari Isti yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.



Contoh :

- a. Saudara Tuti seorang Pegawai Negeri Sipil telah menerima gugatan cerai dari suaminya bernama Amir melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudara Tuti yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suaminya tersebut kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja.
- b. Saudara Rano seorang Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Oktober 1990 telah menerima gugatan cerai dari istrinya bernama Ari melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudara Rano yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat-lambatnya tanggal 7 Nopember 1990.

Catatan :

Tanggal 4 Nopember 1990 adalah hari libur.

4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Contoh :

- a. Saudara Imam mempunyai istri bernama Nuri, keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Saudara Imam bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara Imam yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Kepala BAKN. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat. Saudari NURI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Kepala BAKN.
  - b. Saudari Fatimah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Tenaga Kerja mempunyai suami bernama Dulah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Tingkat I Jawa Barat. Saudari Fatimah bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui pengadilan setempat. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, saudari Fatimah yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Menteri Tenaga Kerja. Saudara Dulah yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
- a. Salah satu pihak berbuat zina.

- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Contoh :

- 1) Saudara Indra (swasta) dengan istrinya bernama Rima (Pegawai Negeri Sipil ) antara keduanya telah terjadi perkecokan. Akibat perkecokan tersebut saudara Indra telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan maupun ijin istri, dan selama meninggalkan istrinya yang bersangkutan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Dalam hal demikian apabila Saudari Rima akan melakukan perceraian, harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak kepergian suaminya.
- 2) Saudari Tina seorang Pegawai Negeri Sipil bersuamikan Saudari Anton seorang pilot di salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1990 saudara Anton melakukan penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan namun pada waktu yang telah ditentukan ternyata pesawat tersebut tidak diketahui secara pasti di mana mendaratnya. Setelah tim SAR mencarinya selama tiga bulan ternyata pesawat tersebut tidak ditemukan dan untuk sementara dinyatakan hilang. Dalam hal ini, apabila saudara Tina akan melakukan perceraian harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak suaminya dinyatakan hilang.

- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
  - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
7. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/sitri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin perceraian.
8. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan ;
9. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masingmasing.

10. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
11. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifanya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
12. Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
13. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
15. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi



yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

16. Merkipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
17. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
18. Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
19. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
20. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian ijin

agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

### C. Syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Ikatan suami isteri adalah ikatan yang sangat suci dan kokoh, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Tidak selamanya pasangan suami isteri mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja terjadi konflik rumah tangga yang sudah sangat mengancam ketenangan rumah tangga sehingga terjadi krisis hubungan suami isteri.

Ikatan sumai isteri yang begitu kuat dan kokoh tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan, namun berbagai faktor penyebab keretakan rumah tangga tidak bisa dielakkan sehingga H. Satria Efendi M. Zein mengatakan "status sosial ekonomi yang tinggi, usia perkawinan yang cukup serta pendidikan yang cukup tinggi tidak menjadi jaminan bagi keharmonisan rumah tangga."<sup>7</sup>

Perceraian tidak dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri kapan dan

<sup>6</sup> Muhammad Amin suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 699.  
<sup>7</sup> Sairia Efendi M'Zein, *Analisis Terhadap Yurisprudensi Talak*. Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum No.20 tahun VI 1995 ,A1-Hikmali dan Direktorat Bidang Peradilan Islam . h 113

dimana saja, karena masalah perceraian telah mempunyai ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1 dan 2) jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatas diatur dalam perundang-undangan.<sup>8</sup>

Mengajukan permohonan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama mesti dilengkapi dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Suatu permohonan talak atau gugatan perceraian yang tidak mempunyai alasan yang cukup jelas, maka permohonan atau gugatan dimaksud dapat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Disini jelas bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yang terbukti dalam persidangan, suami isteri diyakini tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan undang-undang perkawinan.

Adapun alasan untuk mengajukan perceraian telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *op, cit.*, h. 662

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya .
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima ) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 pasal 1 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah
  - a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
    - 1) Yang diperkirakan dengan Pegawai Negri Sipil yaitu:
      - a) Pegawai bulanan di samping pensiun
      - b) Pegawai Bank milik Negara
      - c) Pegawai Badan Usaha milik Negara

- d) Pegawai Bank Milik Negara
- e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
- f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang  
meyelenggarakan urusan Pemerintah di Desa.

2) Pejabat adalah:

- a) Menteri
- b) Jaksa Agung
- c) Pimpinan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara
- d) Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
- e) Pimpinan Bank Milik Negara
- f) Pimpinan Badan Usaha milik Negara
- g) Pimpinan Bank milik Daerah
- h) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Pasal 2.

1. Peg  
awai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib  
memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam  
waktu selambat-lambatnya (1) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
2. Ket  
entuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri  
Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3.

1. Peg  
 awai Negri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat
2. Per  
 mintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis
3. Dal  
 am surat permintaan izin peceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu

Pasal 4.

1. Peg  
 awai Negri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,
2. Peg  
 awai Negri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negri
3. Peg  
 awai Negri Sipil yang akan menjadi istri kedua/ketiga keempat/dari bukan Pegawai Negri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
4. Per

mintaan izin sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dedan ayat (3) diajukan secara tertulis.

5. Dal
- am surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua /ketiga/keempat.

Pasal 5.

1. Permintaan izin sehagaiman dimaksud dalam pasal 3 dan pasal diajukan kepada Pejnbat melalui saluran hierarki.
2. Setiap alasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat,wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya
3. Bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6.

1. P  
 ejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan.

2. A

pabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/istri dari Pegawai Negri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

3.

S

Sebelum mengambil keputusan, pejabat harus lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

#### Pasal 7

1. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini.
2. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat.
3. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila:
  - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan.
  - b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat,

#### Pasal 8.

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negri Sipil Pria maka ia wajib



menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya.

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah seperti untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan Oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku apabila istri meminta karena dimadu.
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

## Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian atau akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu kepada Presiden.
2. Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II Termasuk Walikota Administratif,

wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negri.

3. Pimpinan Bank Milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari menteri yang secara teknis membawai Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.
4. Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin dahulu Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13.

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) atau untuk menjadi istri kedua/ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Alasan perceraian bagi pegawai negeri sipil di samping diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990.<sup>9</sup>

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 bagi pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut akan mendapatkan sanksi hukuman berat sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### **D. Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Dalam hukum perdata disamping kewenangan/ kekuasaan absolut Pengadilan Agama dikenal juga dengan kewenangan / kekuasaan relative. Kewenangan absolut berdasarkan yuridiksi mengadili, sedangkan kewenangan relative berdasarkan kekuasaan daerah hukum masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan yang telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya.<sup>10</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu perceraian merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama

---

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (UU No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h. 19

Dalam pasal 38 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Tata cara perceraian atau prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru diatur Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Pasal3:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebihdahuludariPejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dalam pasal 5-nya, ditegaskan bahwa izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis. Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu **selambat-lambatnya tiga bulan** terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. **Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.** Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila alasan perceraian tersebut terdapat hal-ahal sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:
  - 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Ketentuan Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 selain berlaku bagi pegawai negeri sipil, berlaku pula bagi pegawai yang dipersamakan dengan PNS yakni :

- a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
  - b) Pegawai Bank milik Negara
  - c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
  - d) Pegawai Bank milik Daerah;
  - e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
- 8) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 723.

**BAB IV**  
**PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN**  
**AGAMA PEKANBARU**

**A. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dan menurut keyakinan bangsa Indonesia semua manusia (termasuk PNS) adalah Abdi Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pada dasarnya putusan Pengadilan Agama mengacu kepada hukum nasional yang berlaku dan tertera dalam PP. No. 10 Tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga yang disamakan dengan pegawai Negeri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat dan ayat 2 sebagaimana berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah
  - a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
  - b. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu :
    1. Pegawai bulanan disamping pensiunan
    2. Pegawai bulanan Bank milik Negara
    3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
    4. Pegawai Bank milik Negara

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia* (Yogyakarta Liberty, 1988), h. 22



5. Pegawai Badan Usaha milik Daerah

6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Desa.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perceraian antara pegawai negeri sipil dengan yang tidak pegawai negeri sipil tidak mempunyai perbedaan yang begitu banyak, yang berbeda adalah apabila pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian, harus mendapatkan izin dari atasan tempatnya bekerja. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pegawai yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pada tanggal 02 November 2010, penulis mewawancarai hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu Drs. Ahmad Anshari M. SH mengatakan bahwa:

Pada dasarnya prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai perbedaan dengan prosedur perceraian yang bukan Pegawai Negeri Sipil. adapun prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut, namun yang menjadi perbedaan prosedur perceraian pegawai negeri sipil dengan yang tidak Pegawai Negeri Sipil adalah pada surat izin. Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus melampirkan surat izin dari atasan tempatnya bertugas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>, Undang-Undang Pokok Perwakilan beserta peraturan khusus untuk Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta : Bumi Askara 1996), h.23.

<sup>3</sup> Drs. Ahmad Anshari M. SH, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 02 November 2010

Zahniar, S.H, sebagai salah seorang panitera pengganti di Pengadilan Agama Peknbaru, yang penulis wawancara pada tanggal 03 November 2010 menerangkan tentang Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa :

Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut. Tapi bagi pegawai negeri sipil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh panitera. yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus ada melampirkan surat izin dari atasan tempatnya bertugas.
2. Jika pegawai negeri sipil tidak mendapat izin dari atasannya, maka penggugat atau pegawai negeri yang akan melakukan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima resiko apapun yang akan terjadi setelah perceraian.
3. Jika pegawai negeri sipil yang menjadi tergugat, atau diceraikan, maka pegawai negeri sipil harus melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari atasan tempatnya bertugas.<sup>4</sup>

Penulis juga mewawancarai ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tentang prosedur perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil, yaitu bapak Drs. H. Taufiq Hamami, SH mengatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Zahniar, Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 03 November 2010

Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu mulai dari masuknya permohonan perceraian sampai diputuskannya perkara tersebut, namun pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian harus melampirkan surat izin dari atasan tempatnya bertugas atau melampirkan surat keterangan perceraian dari atasan tempatnya bertugas.<sup>5</sup>

Begitu juga wakil ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang penulis wawancara pada tanggal 05 November 2010, mengatakan hal yang sama tentang prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu harus melampirkan surat izin dari atasan, atau surat keterangan perceraian dari atasannya.<sup>6</sup>

Setelah penulis dapatkan penjelasan dari hakim dan panitera, ketua, dan wakil ketua di Pengadilan Agama Pekanbaru, menjelaskan bahwa Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, namun dalam Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru harus melampirkan surat izin dari atasannya, jika tidak mendapatkan izin dari atasannya, maka penggugat atau Pegawai Negeri yang akan melakukan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima semua resiko yang akan terjadi setelah terjadinya perceraian. Namun ada beberapa faktor penghambat yang terjadi pada kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam prosedur perceraian di kalangan

---

<sup>5</sup> Drs. H. Taufiq Hamami, SH, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 04 November 2010

<sup>6</sup> Drs. H. Firdaus HM, SH, wakil ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 05 November 2010

Pegawai Negeri Sipil, pada sub selanjutnya penulis akan menguraikan faktor-faktor penghambat dalam prosedur perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pegawai di Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### **B. Faktor Penghambat Dalam prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Pada dasarnya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, namun yang menjadi kendala bagi pegawai di pengadilan tentang prosedur perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah pegawai yang akan melakukan perceraian belum mendapat izin dari atasannya, tetapi Pegawai Negeri Sipil ini tetap ingin melakukan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan panitera pengganti di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu Zahniar mengatakan bahwa:

Salah satu kendala bagi Pengadilan Agama Pekanbaru dalam prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan izin dari atasan tempatnya bertugas, dan Pegawai Negeri Sipil ini tetap ingin melakukan perceraian, di Pengadilan Agama Pekanbaru satu perkara tersebut harus dapat diputuskan dalam jangka 6 bulan. Namun berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1990 prosedur perceraian bagi PNS harus mendapatkan izin dari atasan, dan dalam pola administrasi Pengadilan Agama juga mengatur bahwa jika PNS yang melakukan perceraian harus melampirkan surat izin perceraian dari atasannya.

Oleh sebab itu salah satu cara yang dilakukan agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tanpa melibatkan pihak Pengadilan Agama Pekanbaru, maka pihak PNS yang akan melakukan perceraian tersebut harus melampirkan surat pernyataan yang berisikan bahwa penggugat sebagai PNS akan menerima semua resiko apapun yang akan terjadi dari instansi tempat bertugas, tanpa melibatkan pihak pengadilan.<sup>7</sup>

Begitu juga ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang penulis wawancarai pada tanggal 04 November 2010 mengatakan bahwa:

Faktor penghambat lambatnya diputuskan pereraian di kalangan PNS adalah PNS yang akan melakukan perceraian tidak mendapat izin dari atasannya, sedangkan PNS yang akan bercerai tetap ingin melakukan perceraian dengan alasan-alasan yang mereka uraikan.

Jika dilihat peraturan pada PP Nomor 45 tahun 1990 telah mengatur dengan jelas bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat izin dari atasannya, dan Pegawai Negeri Sipil yang digugat atau ingin diceraikan harus mendapatkan keterangan bercerai dari atasan.

Hal inilah yang menjadi factor penghambat lambatnya diputuskan perkara perceraian dari kalangan PNS, namun pada dasarnya Pengadilan Agama dengan instansi PNS bertugas tidak mempunyai hubungan tentang pelaksanaan di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu jika PNS yang ingin melakukan perceraian walau belum dapat izin dari

---

<sup>7</sup> Zahniar, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 03 November 2010

atasannya harus membuat surat pernyataan akan menanggung semua resiko yang akan terjadi setelah diputuskannya perkara tersebut tanpa melibatkan pihak pengadilan.<sup>8</sup>

Begitu juga dikemukakan oleh bapak Drs. Ahmad Anshari M. SH sebagai seorang satu hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang penulis wawancarai pada tanggal 02 november 2010, mengatakan bahwa:

Pada dasarnya tugas hakim dalam pelaksanaan perkara perceraian adalah melakukan usaha perdamaian antara suami dan istri agar tidak melakukan perceraian, tetapi jika tidak dapat di damaikan, maka hakim akan memutuskan untuk mengabulkan permintaan penggugat untuk melakukan perceraian, mudah-mudahan itu adalah jalan terbaik bagi suami istri tersebut.

Begitu juga halnya pada perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS, tidak mempunyai perbedaan dengan perkara perceraian yang dilakukan oleh selain PNS, namun hakim juga harus memberikan ketegasan kepada PNS yang ingin bercerai dan tidak dapat lagi untuk didamaikan lagi tentang izin dari atasannya, bahwa tidak adanya izin dari atasan sebenarnya berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1990 PNS tidak dapat melakukan perceraian, namun dengan adanya surat pernyataan dari PNS bahwa akan menerima resiko apapun yang akan terjadi setelah putusan yang hakim berikan, tanpa melibatkan pihak pengadilan atau hakim yang memutuskan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pegawai di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menangani perkara perceraian khususnya pada

---

<sup>8</sup> Drs. H. Taufiq Hamami, SH, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 04 November 2010

<sup>9</sup> Drs. Ahmad Anshari M. SH, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 02 November 2010

penelitian ini adalah perkara perceraian yang dilakukan dari kalangan PNS, dapat penulis simpulkan bahwa dalam prosedur perkara perceraian yang terjadi pada kalangan PNS adalah PNS yang ingin melakukan perceraian tidak mendapatkan izin dari atasannya, berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur bahwa jika dari kalangan PNS ingin melakukan perceraian harus mendapat izin dari atasannya, dan begitu juga telah diatur dalam pola administrasi Pengadilan Agama, jika dari kalangan PNS yang ingin melakukan perceraian dan memasukkan permohonan ke pengadilan agama, harus melampirkan surat izin dari atas tempatnya bertugas.

Namun, pada kenyataannya di Pengadilan Agama Pekanbaru ada beberapa perkara perceraian dilakukan oleh PNS yang belum mendapat izin dari atasannya, dan diputuskan oleh hakim dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya dikabulkan oleh hakim untuk melakukan perceraian. Hal tersebut dapat terjadi karena PNS yang akan melakukan perceraian dan tidak mendapat izin dari atasannya melampirkan surat pernyataan yang berisi bahwa PNS yang akan melakukan perceraian menanggung resiko apapun yang akan terjadi setelah diputuskannya perkara tersebut, tanpa adanya melibatkan pihak Pengadilan Agama Pekanbaru. Karena melampirkan surat pernyataan tersebut adalah salah satu jalan agar perkara tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan.

Selain pegawai di Pengadilan Agama Pekanbaru, penulis juga mewawancarai PNS yang bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru tetapi tidak mendapatkan surat izin dari atasannya, yaitu ibu Dwi Prihastuti Binti Bambang Koesnando mengatakan bahwa, prosedur perceraian PNS di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak ada perbedaan dengan prosedur perceraian selain PNS, tetapi PNS yang ingin melakukan perceraian harus

melampirkan surat izin perceraian dari atasan, jika tidak mendapat surat PNS boleh melanjutkan perceraian dengan syarat harus melampirkan surat pernyataan.<sup>10</sup>

Ibu Iryusni Idris Binti Idris Yusuf juga mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat perceraian di kalangan PNS adalah PNS harus mendapat izin dari atasan, namun jika tidak mendapat surat izin, pengadilan akan memberi waktu selama 6 bulan paling lama untuk mengurus surat izin dari atasan, jika tidak juga mendapatkan surat izin, pengadilan agama tetap bisa melanjutkan dengan syarat membuat surat pernyataan.<sup>11</sup>

Selanjutnya bapak Safrianto bin Sairun mengatakan bahwa perbedaan prosedur perceraian antara PNS dengan selain PNS adalah PNS harus melampirkan surat izin dari atasan tempat PNS bertugas.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan hasil wawancara dengan ketiga PNS yang melakukan perceraian tanpa adanya surat izin dari atasannya bahwa prosedur perceraian PNS di pengadilan agama pekanbaru tidak jauh berbeda dengan perceraian yang dilakukan selain PNS, yang menjadi perbedaan hanya PNS harus melampirkan surat izinkan dari atasan, dan jika tidak mendapatkan surat izin, maka PNS yang akan melakukan perceraian harus melampirkan surat pernyataan yang berisi akan menerima semua resiko yang akan terjadi setelah diputuskannya perkara tanpa melibatkan pihak pengadilan.

---

<sup>10</sup> Dwi Prihastuti Binti Bambang Koesnando, PNS yang berperkara, *Wawancara*, pada tanggal 08 November 2010

<sup>11</sup> Iryusni Idris Binti Idris Yusuf, PNS yang berperkara, *Wawancara*, pada tanggal 08 November 2010

<sup>12</sup> Safrianto bin Sairun, PNS yang berperkara, *Wawancara*, pada tanggal 08 November 2010



### **C. Tinjauan PP No. 45 Tahun 1990 terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Akan tetapi, tidak semua perkawinan berhasil mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang muncul, sehingga dalam kehidupan perkawinan terkadang terjadi ketidakharmonisan suami istri, saling menyalahkan, saling egoisme, mau mencari menang sendiri, bahkan saling tampar-menampar, sehingga keutuhan rumah tangga terancam runtuh dan sulit untuk dipertahankan. Keadaan demikian berakibat putusnya hubungan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah ditegaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh tiga faktor yaitu, kematian, perceraian, dan karena putusan hakim.

Dengan demikian perceraian merupakan salah satu faktor penyebab putusnya perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini merupakan suatu kejadian yang menghilangkan suatu hak-hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga. Dengan adanya perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami ataupun istri yang ditinggalkan, anak maupun terhadap harta benda dalam perkawinan. Dari akibat hukum tersebut, maka yang sering menjadi persengketaan bagi para pihak adalah mengenai harta benda dalam perkawinan yang berujud harta bersama.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya untuk kelompok warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, oleh pemerintah pada tanggal 21 April 1983 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Selanjutnya dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah keluarga. Ketidakharmonisan kehidupan keluarga yang terus menerus bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan sangat mengganggu tugas-tugas kedinasannya, oleh karena itu perceraian adalah hal yang mungkin dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Namun disisi lain Pegawai Negeri Sipil juga terikat oleh PP 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990, yang tentunya tidak mudah bagi seorang Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perceraian. Selain itu apabila seorang

Pegawai Negeri Sipil telah dapat melewati rambu-rambu yang ada pada PP tersebut ia dapat melakukan perceraian.

Adapun rambu-rambu tersebut adalah sebagai mana penulis telah menguraikan pada bab III, yaitu tata cara perceraian atau prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Pasal3:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Namun, berdasarkan hasil penelitian peneliti dalam perkara perceraian PNS di Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa adanya dari kalangan PNS yang melakukan perceraian tanpa adanya surat izin dari atasannya dan diputuskan oleh hakim dengan berkekuatan tetap, alasan hakim untuk melangsungkan perkara perceraian PNS yang

tidak mendapat izin dari atasannya adalah untuk kemaslahatan umat, karena pasangan suami istri dari kalangan PNS tersebut tidak akan dapat untuk berdamai dan tidak ada jalan keluar kecuali bercerai.

Pada dasarnya surat izin dari atasan adalah suatu kewajiban yang harus didapatkan bagi kalangan PNS yang ingin melakukan perceraian, namun berdasarkan peraturan yang telah diatur oleh Mahkamah Agung bahwa setiap perkara yang masuk Pengadilan Agama harus selesai dalam jangka waktu 6 bulan, begitu juga halnya perkara permohonan cerai bagi kalangan PNS harus selesai dalam jangka waktu 6 bulan, jika dalam jangka waktu tersebut PNS yang ingin melakukan perceraian belum mendapatkan surat izin dari atasan tempatnya bertugas, dan tetap ingin melakukan perceraian, maka mahkamah agung mewajibkan kepada PNS yang ingin melakukan perceraian untuk membuat surat pernyataan bahwa PNS yang ingin melakukan perceraian tidak akan melibatkan pihak pengadilan jika terdapat masalah di kemudian hari, dan pihak PNS yang ingin melakukan perceraian akan menerima semua resiko yang akan terjadi.

Berdasarkan analisa penulis tentang perceraian dikalangan PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, jika PNS tidak mendapat izin dari atasannya, maka PNS tidak dapat melangsungkan perceraian, karena harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya, jika PNS tetap melakukan perceraian maka akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan, diantaranya adalah diturunkan golongannya, atau dipecat dari PNS tanpa mengajukan surat permohonan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya aturan ini diberlakukan agar hakim Pengadilan Agama tak mempermudah cerai dari kalangan PNS, namun dalam pengadilan agama juga mempunyai aturan-aturan dalam berperkara, yaitu satu perkara tersebut harus diselesaikan dalam waktu enam bulan, dan bagi kalangan PNS yang tidak mendapatkan izin dari atasannya pihak pengadilan akan memberikan peringatan untuk segera memperoleh surat izin, jika tidak mendapatkan surat izin, dan PNS ingin melakukan perceraian juga dan pihak pengadilan juga tidak dapat mendamaikan, maka pihak PNS harus membuat surat pernyataan akan menerima semua resiko yang akan terjadi setelah perkara berkekuatan hukum tetap tanpa melibatkan pengadilan.

Oleh sebab itu berdasarkan penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan aturan di Pengadilan Agama tidak mempunyai hubungan dalam masalah perkara perceraian PNS, oleh karena itu pihak pengadilan dapat melangsungkan perkara perceraian dari kalangan PNS tanpa ada surat izin dari atasan tempat PNS yang berperkara.

Oleh sebab itu penulis mengharapkan agar pemerintah memberikan suatu aturan yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam rangka untuk terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tertibnya perceraian yang terjadi dikalangan PNS, karena

PNS merupakan pegawai pemerintah yang akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, terutama dalam hal perceraian.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini dari hasil wawancara penulis dengan pegawai di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

1. Prosedur perceraian pegawai negeri sipil di pengadilan agama pekanbaru sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, namun dalam Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru harus melampirkan surat izin dari atasannya, jika tidak mendapatkan izin dari atasannya, maka penggugat atau pegawai negeri yang akan melakukan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima semua resiko yang akan terjadi setelah terjadinya perceraian.
2. Factor penghambat lambatnya diputuskan pereraian di kalangan PNS adalah PNS yang akan melakukan perceraian tidak mendapat izin dari atasannya. Jika PNS yang ingin melakukan perceraian walau belum dapat izin dari atasannya harus membuat surat pernyataan yang berisikan akan menanggung semua resiko yang akan terjadi setelah diputuskannya perkara tersebut tanpa melibatkan pihak pengadilan.
3. Berdasarkan tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

## **B. Saran**

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil peneliti di atas, berkaitan dengan prosedur perceraian di kalangan PNS, peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan perceraian, agar dapat memperhatikan dengan baik persyaratan perceraian PNS yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar lebih memperketat untuk menyelesaikan perkara cerai yang terjadi di kalangan PNS, jika PNS ingin melakukan perceraian harus melampirkan surat izin dari atasannya, jika tidak ada diharapkan kepada pihak pengadilan tidak menyelesaikan perkara tersebut, mengingat peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
3. Kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kedisiplinan peraturan-peraturan PNS, terutama dalam masalah perceraian, jika PNS melakukan perceraian tidak mendapatkan surat izin dari atasannya diharapkan memberikan sanksi yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet ke – III
- Effendi Siregar dkk (tim penyusun ), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pekanbaru, 2007
- Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, cet- pertama penerbit Pustaka Al Husnah, Jakarta, 1994
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet ke- 1
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987)
- Moch Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1984), cet ke-II
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia* (Yogyakarta Liberty, 1988)
- Muhammad Amin suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, 2009
- Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 192
- Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta:Media Sarana Press,1986)
- Sairia Efendi M Zein, *Analisis Terhadap Yurisprudensi Tentang Talak* . Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum No.20 tahun VI 1995  
A1-Hikmali dan Direktorat Bidang Peradilan Islam
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 1986), cet ke-II
- Siti Hutami, SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara, 1991
- Undang-Undang Pokok Perwakilan beserta peraturan khusus untuk Anggpta POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negari Sipil, (Jakarta : Bumi Askara 1996)
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1980)
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (UU No. 7 Tahun 1989), Jakarta: Pustaka Kartini, 1989